



Wali Kota Bantah Menyuap Jaksa

KPK Periksa
Saksi Kasus SAH
di Kantor BPKP DIJ

JOGJA, Radar Jogja - Bola panas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemkot Jogja terus bergulir. Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut

mulai menyebut Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS).

Bahkan, Haryadi diperiksa KPK di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIJ Selasa (5/11). Politikus Partai Golkar tersebut menjadi salah satu dari delapan saksi yang diperiksa terkait kasus suap lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Jalan Supomo Jogja ■

► Baca *Wali Kota...* Hal 7

PROYEK RP 8,3 MILIAR

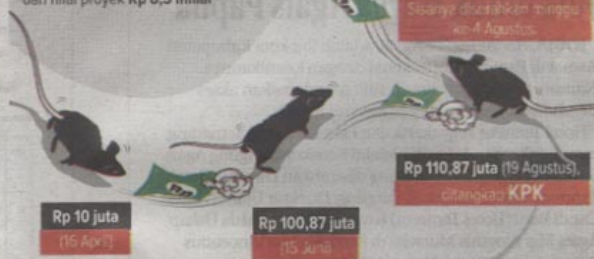
KPK menetapkan tiga tersangka usai operasi tangkap tangan atas lelang proyek di DPUPKP Kota Jogja. Proyek itu pengadaan rehabilitasi saluran air hujan kawasan Jalan Supomo Jogja bernilai Rp 8,3 miliar.

Tersangka OTT:

- Eka Safitri (Jaksa Kejari Jogja)
- Satriawan Sulaksono (Jaksa Kejari Solo)
- Gabriella Yuan Ana (Direktur PT Manira Arta Mandiri)

Fee Suap Proyek TP4D:

5 Persen (Rp 415 juta) dari nilai proyek Rp 8,3 miliar



Rp 10 juta
(15 April)

Rp 100,87 juta
(15 Juni)

Rp 110,87 juta (19 Agustus),
ditangkas KPK

Saya mengikuti segala hal yang berkaitan dengan proses hukum. Kalau diundang, ya datang. Ditanya sebagai saksi ya, menjawab kan gitu."

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Jogja



FOTO: WINDA ATKA BA PUSITA, SHAFIS BIRMAN TO CAPTIONER/BAK JOGJA

Wali Kota Bantah Menyuap Jaksa

Sambungan dari hal 1

"Saya mengikuti segala hal yang berkaitan dengan proses hukum. Kalau diundang, ya datang. Di-

tanya sebagai saksi ya, menjawab *kan gitu*," kata HS ditemui wartawan di Balai Kota Timoho Jog-

ja kemarin (8/11). Diperiksa pula ketua DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 Sujanarko dan

mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Christiana Agustina. Dalam kasus suap lelang pekerjaan rehabilitasi SAH tersebut, adanya dugaan aliran dana atau suap dari kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKPK) Kota Jogja dan Wali Kota Jogja kepada jaksa Eka Safitra. Eka kini menjadi tersangka.

Haryadi membantah hal tersebut. Dia menegaskan tidak menerima duit dari proyek. "Saya ditanya itu, ya saya jawab. Tidak ada. *Udah* itu saja," terangnya.

HS beralih hanya tahu Eka. Namun, dia tidak mengenalnya. Dia juga mengaku mengetahui masalah yang menjerat Eka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Selain Haryadi, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Ketua DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 Sujanarko. Dikonfirmasi, Sujanarko membenarkan dipe-

riksa sebagai saksi kemarin (8/11). "Ya benar ini saya baru ke sini (diperiksa) karena kemarin saya baru sakit," katanya saat dihubungi wartawan.

Sujanarko menjelaskan, kapasitasnya dalam pemeriksaan itu sebagai saksi. Yakni, diminta konfirmasi terkait jabatannya selama lima tahun menjadi ketua dewan. Selain itu, terkait jabatannya sebagai pimpinan alat kelengkapan dan anggota alat kelengkapan di dewan.

"Itu yang dipertanyakan. Saya lupa berapa pertanyaan, karena spontan *ya* tanyanya. Tapi, seputar kapasitas saya sebagai pimpinan dewan," jelasnya.

Secara teknis, ujar Sujanarko, dia sama sekali tidak mengikuti proyek SAH tersebut. Saat perencanaan, dia menuturikan, sudah sesuai kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran (KUA-PPAS). "Jadi, hanya sebatas itu. Kalau secara teknis, saya nggak

tahu karena itu sudah urusannya dengan dinas," terangnya.

Christiana Agustina mengungkapkan diperiksa oleh KPK. Dia ditanya terkait kapasitasnya yaitu berkaitan dengan penganggaran.

Dia juga sempat ditanya nama-nama terjerat kasus tersebut. "Saya jawab tidak. Saya tidak tahu. Ya, memang saya baru tahu namanya saja ketika ada berita muncul," tambah politikus Partai Gerindra ini.

Terpisah, anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba mendukung proses hukum yang sedang berlangsung di KPK dalam dugaan korupsi proyek SAH. Siapapun yang terlibat kasus ini harus diproses hukum.

"Tentunya, sesuai dengan prinsip *equality before the law*, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya. (cr15/amd/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005